KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Gerindra kirimkan Anggota
Tanggal : Kamis, 18 Mei 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

Gerindra Kirimkan Anggota

● ALI MANSUR

Hingga satu hari menjelang rapat paripurna, belum ada fraksi yang mengirimkan anggota.

JAKARTA — Partai Gerindra akhirnya memutuskan mengirimkan anggotanya ke Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyidikan kasus korupsi KTP-el. Padahal, sebelumnya Gerindra tidak ingin mengirimkan wakilnya ke pansus sebagai bentuk penolakan hak angket KPK.

Juru bicara Partai Gerindra terkait hak angket KPK, Sodik Mujahid, mengatakan, mengirim perwakilan ke pansus bukan berarti partainya setuju dengan bergulirnya hak angket KPK. Pihaknya tetap konsisten untuk menolak Hak Angket KPK yang kontroversial tersebut.

"Kami kaji dan pelajari bahwa hak angket KPK ini masih bisa berjalan meski sejumlah fraksi tidak mengirim anggotanya. Maka tentu situasi seperti ini menjadi kerugian kalau kami tidak kirim utusan," jelas Sodik, Rabu (17/5).

Rencananya; setelah masa reses berakhir, Gerindra bakal mengirimkan dua anggotanya untuk bergabung ke dalam Pansus Hak Angket KPK. Sodik berharap delegasi dari Partai Gerindra dapat berjuang maksimal untuk menolak hak angket KPK.

Sebelumnya, Partai Gerindra menolak pembentukan hak angket KPK. Bahkan, mereka melakukan *walkout* yang dikomandani oleh Ahmad Muzani. Dia berharap agar di dalam pansus pihaknya bisa memengaruhi dengan melobi-lobi.

Tidak hanya menolak hak angket, Gerindra juga menolak mengirimkan wakilnya ke pansus. Partai Gerindra tidak akan mengirimkan wakilnya untuk membahas hak angket terkait KPK. Gerindra juga bakal membujuk fraksi lain untuk tidak melanjutkan hak angket tersebut. "Pimpinan fraksi tadi siang menegaskan tidak akan kirim wakil



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

ke pansus," kata Sodik , Selasa (2/5).

Sodik mengatakan, pihaknya juga bakal berbicara dengan fraksi lain terkait hak angket. Komunikasi, kata dia, akan terus dibangun.

Namun, lanjut Sodik, komunikasi baru akan intensif saat masa reses usai. Menurut Sodik, komunikasi tak hanya dibangun dengan partai yang menolak hak angket, akan tetapi juga dengan fraksi yang menerima hak angket.

Sementara, masa reses DPR segera berakhir dan rapat paripurna akan digelar pada Kamis (18/5). Namun, hingga saat ini belum satu pun fraksi menyetorkan nama anggotanya untuk anggota Pansus Hak Angket KPK. Ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

"Sepengetahuan saya, sampai Kamis (17/5) belum ada yang masuk anggota dari kepanitiaan angket. Jadi, besok paripurna pembukaan, besok acaranya tunggal, pembukaan dibacakan ketua DPR," saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (17/5).

Kemudian, setelah paripurna pembukaan, DPR akan menyelenggarakan rapat Badan Musyawarah (Bamus). Kata Agus, rapat Bamus itu untuk menentukan agenda rapat dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan dilaksanakan pada Jum'at (19/5). Selanjutnya, jika dalam rapat Bamus itu ada fraksi yang menyetorkan perwakilannya, maka Pansus Hak Angket KPK bisa langsung dibahas.

> **Hak angket KPK akan diputuskan secara kolektif kolegial.**

"Begitu juga sebaliknya, apabila tidak ada fraksi yang mengirimkan anggotanya, maka kepanitiaan angket itu tidak bisa dibentuk," tambah Politikus Partai Demokrat tersebut.

Namun, kata Agus, apa pun keputusan perihal hak angket KPK akan diputuskan secara kolektif kolegial. Sebab, menurut Agus, hak angket KPK yang disetujui oleh DPR RI pada rapat paripurna sebelumnya merupakan hak yang melekat pada setiap anggota. Sehingga, dengan demikian, tidak putusan fraksi atau pimpinan DPR RI. "Apa pun putusan angket interpelasi, semuanya kolektif kolegial," tutup Agus.

■ ed: muhammad hafil

PERPUSTAKAAN DPR-RI